



Katalog BPS : 4103.5301

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMBA BARAT 2014



KERJASAMA BAPPEDA KABUPATEN SUMBA BARAT
DAN BPS KABUPATEN SUMBA BARAT

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUMBA BARAT
2014**

<http://sumbabaratkab.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMBA BARAT 2014

.....

No. Publikasi / Publication Number : 53012.001

Katalog BPS / BPS Catalogue : 4103.5301

Ukuran Buku / Book Size : 21,59 cm x 27,94 cm

Jumlah Halaman / Total Pages : 36 Halaman / Pages

Naskah / Manuscript :

Seksi Statistik Sosial

Social Statistics Section

Gambar Kulit / Cover Design :

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Integration Processing and Statistical Dissemination Section

Diterbitkan oleh / Published by :

BPS Kabupaten Sumba Barat

BPS - Statistics of Sumba Barat Regency

Dicetak oleh / Printed by :

CV. Bima Media Mandiri

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat 2014” disusun guna memenuhi kebutuhan pengguna data statistik, khususnya statistik sosial. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat kembali menerbitkan Publikasi ini.

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman berbagai data dasar yang bersumber dari sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS serta data sekunder yang diperoleh dari instansi lain di luar BPS.

Penerbitan publikasi ini merupakan hasil kerja sama BPS Kabupaten Sumba Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat khususnya dalam penyediaan dana tambahan sehingga data yang disajikan menjadi lebih lengkap serta perwajahan yang lebih baik.

Maksud penerbitan publikasi ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan kesejahteraan rakyat Sumba Barat dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan publikasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih bagi terbitnya publikasi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak kami mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Waikabubak, September 2014

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sumba Barat,



Ir. Suprih Handayani
NIP. 19660703 199401 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Pendahuluan	viii
1. Kependudukan	1
- Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
- Kepadatan Penduduk	2
- Komposisi Umur dan Jenis Kelamin	3
- Perkawinan dan Keluarga Berencana.....	6
2. Kesehatan dan Gizi	10
- Status Kesehatan	10
- Status Gizi Balita	11
- Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	13
3. Pendidikan	16
- Tingkat Pendidikan	16
- Tingkat Partisipasi Sekolah	18
- Fasilitas Pendidikan	19
4. Ketenagakerjaan	21
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja..	21
- Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan	23
- Jam Kerja	25
5. Pola Konsumsi	27
- Perubahan Tingkat Kesejahteraan	27
- Pola Konsumsi Rumah Tangga	29
6. Perumahan dan Lingkungan	30
- Kualitas Rumah Tinggal	30
Daftar Pustaka	34
Istilah Teknis	35

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2013 ...	1
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2012 dan 2013	2
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013 (Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2013).....	3
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013	4
Tabel 1.5	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2012-2013	6
Tabel 1.6	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2012-2013	7
Tabel 1.7	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Sedang Tidaknya Menggunakan/Memakai Alat/ Cara KB Tahun 2012-2013	8
Tabel 1.8	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai Tahun 2012-2013.....	9
Tabel 2.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2013 ...	10
Tabel 2.2	Persentase Anak Usia 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui Tahun 2012-2013.....	12
Tabel 2.3	Perkembangan Status Gizi Balita Tahun 2012 dan 2013	12
Tabel 2.4	Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2012-2013	13
Tabel 2.5	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2012-2013	14
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Tahun 2012-2013	15
Tabel 3.1	Persentase Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2013	16

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2012-2013.....	17
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah Tahun 2012-2013	18
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2013	19
Tabel 3.5	Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2012-2013.	20
Tabel 4.1	TPAK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2013.....	22
Tabel 4.2	Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2013..	22
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2013.....	23
Tabel 4.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2013.....	24
Tabel 4.5	Persentase Penduduk yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2013.....	25
Tabel 4.6	Persentase Penduduk yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin Tahun 2012 -2013.....	26
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Tahun 2012-2013..	28
Tabel 5.2	Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013 (Rupiah)	29
Tabel 6.1	Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2012-2013	31
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2012-2013.....	32

DAFTAR GAMBAR

	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2012 dan 2013.....	2
Gambar 1.2	Angka Beban Tanggungan Anak dan Lanjut Usia Tahun 2013..	5
Gambar 1.3	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2013....	6
Gambar 1.4	Rasio Jenis Kelamin Menurut Status Perkawinan Tahun 2013...	7
Gambar 1.5	Persentase Wanita 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2012-2013.....	8
Gambar 2.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2013.....	11
Gambar 3.1	Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2013.....	16
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013	21
Gambar 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013	23
Gambar 5.1	Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2013	29
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tinggal menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2013.....	31
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2012-2013.....	32

PENDAHULUAN

1. Ruang Lingkup

Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat 2014 ini merupakan lanjutan dari seri publikasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan rakyat secara garis besar, diperlukan pengelompokan beberapa masalah sosial yang penting. Ada beberapa tabel yang tidak dimuat kembali dan ada pula data-data baru yang dimasukkan. Penyajian masalah sosial tersebut dibagi dalam enam kelompok, yaitu:

1. Kependudukan
2. Kesehatan dan Gizi
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Pola Konsumsi
6. Perumahan dan Lingkungan

Indikator yang disajikan pada dasarnya berbentuk deskriptif yang telah dipilih, dengan harapan dapat menggambarkan suatu keadaan kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat.

Bentuk penyajian data, selain tabel dasar pada beberapa kelompok disajikan ukuran statistik yang lazim dipergunakan seperti persentase, rasio, proporsi, dan rata-rata yang kesemuanya ditujukan untuk memperjelas perubahan yang terjadi.

2. Sumber Data

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000, dan 2010.

Sensus Penduduk menggunakan dua tahap pencacahan, yaitu pendataan bangunan (listing) dan pencacahan lengkap. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Mulai Tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara triwulanan. Susenas mengumpulkan data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas, serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- (a) Konsumsi/Pengeluaran/Pendapatan
- (b) Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman, dan
- (c) Sosial Budaya, Kesejahteraan Rumahtangga, Kriminalitas

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Sejak tahun 2011, kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan dilakukan secara triwulanan. Pelaksanaan Sakernas Triwulanan Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November)

Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei, Inkesra 2014 juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Departemen/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder.

1. Kependudukan

1. Kependudukan

Kependudukan

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan. Dalam proses dan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk, tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya akan merupakan beban (*liability*) pembangunan jika berkualitas rendah.

Berbagai hal tentang penduduk yang perlu diamati antara lain mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi dan distribusi penduduk, dan lain-lain sangat penting dan berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Sumba Barat pada tahun 2013 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk mencapai 117.787 jiwa. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Sumba Barat selama periode 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2010	110.993	2,16
2011	113.189	1,98
2012	116.621	3,03
2013	117.787	1,00

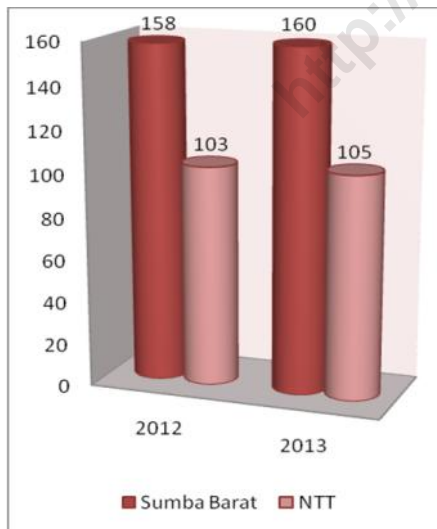
Baik secara absolut maupun relatif (yang dilihat dari laju pertumbuhan penduduk) terlihat bahwa jumlah penduduk Sumba Barat terus bertambah. Kenyataan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten, karena jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat mengakibatkan beban pembangunan yang semakin berat untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Tetapi jika mampu diseimbangkan/di-selaraskan/diserasikan dengan daya dukung dan daya tampung serta kondisi perkembangan sosial ekonomi serta sosial budaya dapat menjadi salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi keberhasilan pembangunan.

Kepadatan Penduduk

Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai luas daratan sebesar 737,42 km² atau 1,56 persen dari total luas daratan wilayah Nusa Tenggara Timur, mempunyai rata-rata kepadatan penduduk sebesar 158 jiwa per km² pada tahun 2012. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2013 adalah sebesar 160 jiwa per km².

Gambar 1.1
Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2012 dan 2013 (Jiwa/Km²)



Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2012 dan 2013

Uraian	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	
	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Sumba Barat	158	160
N T T	103	105

Jika dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur, maka rata-rata kepadatan penduduk Sumba Barat berada di atasnya baik pada keadaan tahun 2012 maupun tahun 2013. Rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012 adalah 103 jiwa per km² dan 105 jiwa per km² pada tahun 2013.

Komposisi Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur sangat penting sebagai dasar penyediaan pelayanan untuk masyarakat. Komposisi penduduk menurut umur juga sangat penting dalam kependudukan. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur. Kebutuhan akan suatu pelayanan bervariasi sepanjang siklus kehidupan. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk umur sekolah dasar (umur 7-12 tahun) sangat besar, maka kebutuhan akan sekolah dasar akan cukup tinggi.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013 (Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2013)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	L + P
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
(1)	(2)	(4)	(6)
0-4	8.567	8.268	16.835
5-9	7.813	7.495	15.308
10-14	7.352	6.934	14.286
15-19	6.518	5.932	12.450
20-24	5.172	4.087	9.259
25-29	4.536	4.058	8.594
30-34	4.194	3.965	8.159
35-39	3.678	3.562	7.240
40-44	3.121	2.985	6.106
45-49	2.695	2.473	5.168
50-54	2.141	2.130	4.271
55-59	1.589	1.597	3.186
60-64	1.241	1.196	2.437
65-69	980	982	1.962
70-74	629	667	1.296
75+	590	640	1.230
Total	60.816	56.971	117.787

Penduduk usia 0-14 tahun berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2013 sebesar 39,42 persen, usia 15-64 tahun sebesar 56,77 persen dan yang berusia 65 tahun ke atas sebesar 3,81 persen dari total penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan penduduk Sumba Barat tergolong penduduk muda karena persentase penduduk anak-anak (usia di bawah 15 tahun) cukup besar, sementara persentase penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) rendah.

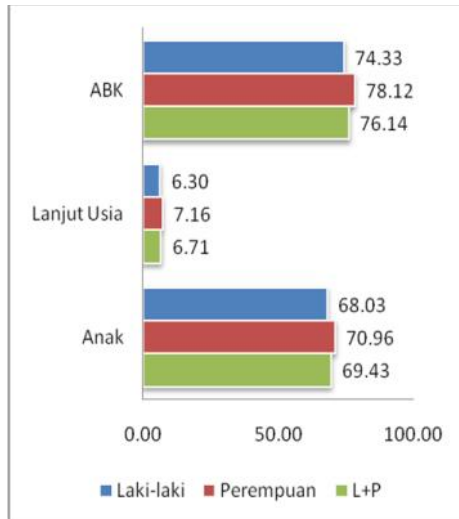
Tabel 1.4 Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	14,09	14,51	14,29
5-9	12,85	13,16	13,00
10-14	12,09	12,17	12,13
15-19	10,72	10,41	10,57
20-24	8,50	7,17	7,86
25-29	7,46	7,12	7,30
30-34	6,90	6,96	6,93
35-39	6,05	6,25	6,15
40-44	5,13	5,24	5,18
45-49	4,43	4,34	4,39
50-54	3,52	3,74	3,63
55-59	2,61	2,80	2,70
60-64	2,04	2,10	2,07
65-69	1,61	1,72	1,67
70-74	1,03	1,17	1,10
75+	0,97	1,12	1,04
Total	100,00	100,00	100,00

Catatan : Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2013

Tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan masih belum signifikan, terlihat pada komposisi penduduk menurut umur, yaitu dengan masih tingginya proporsi penduduk tidak produktif (berumur muda dan lanjut usia). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kelahiran dan juga meningkatnya penduduk usia tua. Kedua faktor tersebut membuat Angka Beban Ketergantungan (ABK/*dependency ratio*) menjadi besar.

Gambar 1.2
Angka Beban Tanggungan Anak
dan Lanjut Usia
Tahun 2013



Pada tahun 2013 persentase penduduk anak-anak di Sumba Barat adalah 39,42 persen sedangkan persentase penduduk lanjut usia sebesar 3,81 persen. Dengan demikian, beban tanggungan anak (*child dependency*) cukup tinggi yaitu sebesar sebesar 69,43 dari ABK yang sebesar 76,14. Tingkat kelahiran yang tinggi cenderung diikuti oleh angka beban tanggungan anak yang tinggi pula. Sedangkan angka beban tanggungan lanjut usia (*old aged dependency*) pada tahun 2013 relatif kecil, yaitu 6,71.

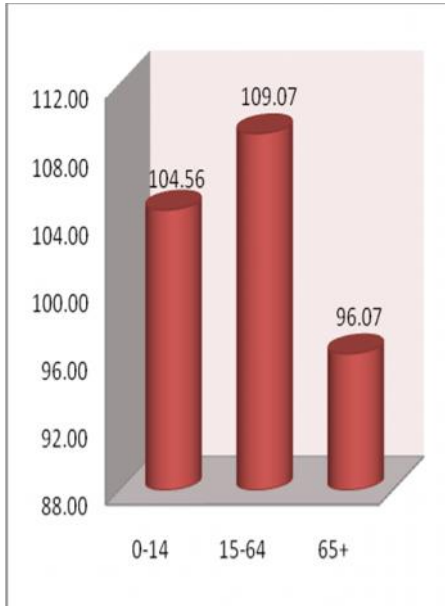
Ukuran yang paling umum untuk melihat struktur jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Ketidakseimbangan dalam struktur jenis kelamin merupakan salah satu masalah kependudukan yang dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi dan dapat mempengaruhi penyediaan pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan berbagai ragam aspek pelayanan terdapat perbedaan jenis pelayanan untuk penduduk laki-laki dan perempuan.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) pada waktu lahir biasanya di atas angka 100, yang artinya jumlah bayi laki-laki lebih banyak daripada bayi perempuan. Selanjutnya sejalan dengan perkembangan umur (sampai umur belasan), maka rasio jenis kelamin ini turun mendekati angka 100. Pada umur selanjutnya jumlah penduduk perempuan biasanya melebihi banyaknya penduduk laki-laki, atau rasio jenis kelaminnya di bawah angka 100. Dengan kata lain, laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada kelompok umur muda, dan perempuan lebih banyak daripada laki-laki pada kelompok umur tua. Pola semacam ini biasanya dikaitkan dengan daya tahan hidup perempuan yang lebih baik daripada laki-laki.

Dari Gambar 1.3 dapat terlihat bahwa rasio jenis kelamin untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2013 adalah sebesar 104,56 dan kelompok umur 15-64 adalah 109,07. Sedangkan pada kelompok umur

Gambar 1.3
Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kelompok Umur
Tahun 2013



65 tahun ke atas Rasio Jenis Kelaminnya adalah 96,07 yang artinya adalah dari 100 orang perempuan pada kelompok umur 65 tahun ke atas terdapat 96 orang laki-laki.

Perkawinan dan Keluarga Berencana

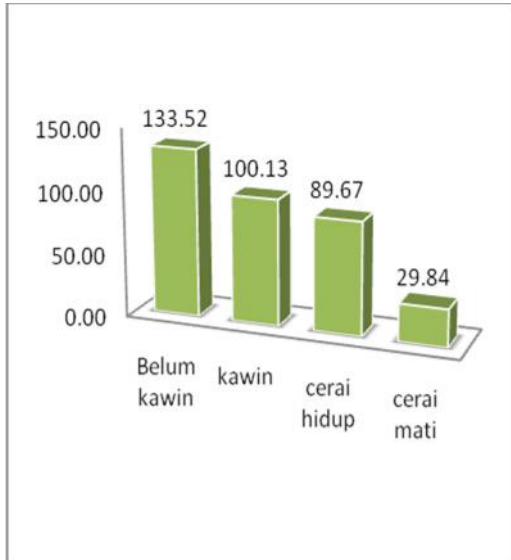
Perkawinan merupakan tuntutan biologis manusia yang berdampak menumbuhkan generasi baru. Akibatnya penambahan penduduk tidak dapat dihindari yang pada gilirannya memberi tekanan pada peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pengaturan kelahiran melalui program keluarga berencana adalah sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2012-2013

Status	2012			2013			
	L	P	L + P	L	P	L + P	
Perkawinan	(1)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	49,17	37,81	43,68	47,92	38,38	43,31	
Kawin	47,91	50,54	49,18	48,78	52,09	50,38	
Cerai Hidup	0,51	1,81	1,14	0,96	1,15	1,05	
Cerai Mati	2,41	9,84	5,99	2,34	8,38	5,26	

Dari tabel 1.5 tampak bahwa proporsi kelompok yang belum kawin pada tahun 2013 lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2012 maka secara umum terjadi peningkatan jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berada pada kelompok Kawin dengan persentase sebesar 50,38 persen. Jika dilihat dari Rasio Jenis

Gambar 1.4
Rasio Jenis Kelamin Menurut
Status Perkawinan
Tahun 2013



Kelamin menurut Status Perkawinan pada tahun 2013 Status Belum Kawin rasionya adalah 133,52. Hal ini berarti pada tahun 2013 jumlah penduduk laki-laki yang belum kawin dalam seratus penduduk perempuan yang belum kawin adalah 134 orang. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan laki-laki untuk menunda melakukan perkawinan. Sebaliknya, pada kelompok kawin tampak bahwa proporsi penduduk perempuan tidak jauh berbeda daripada proporsi penduduk laki-laki pada periode yang sama. Dapat terlihat pada Gambar 1.4 Rasio Jenis Kelamin (RJK) untuk Status Perkawinan status Kawin, rasionya adalah 100,13 yang berarti terdapat 100 laki-laki status Kawin dalam 100 orang perempuan yang berstatus Kawin.

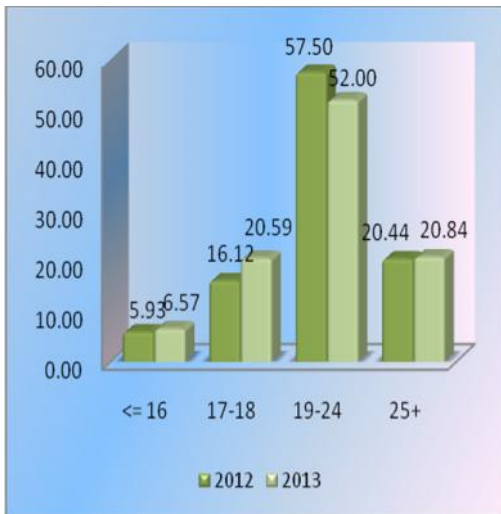
Pada kelompok cerai hidup tahun 2013 proporsi laki-laki jauh lebih sedikit dibanding perempuan dengan rasio jenis kelamin 89,67. Pada kelompok cerai mati proporsi perempuan masih lebih tinggi dengan rasio jenis kelamin 29,84. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih suka memilih untuk tetap hidup sendiri daripada penduduk laki-laki.

Tabel 1.6 Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kab. Sumba Barat Tahun 2012-2013

Umur Perkawinan Pertama	2012	2013
(1)	(2)	(3)
16	5,93	6,57
17-18	16,12	20,59
19-24	57,50	52,00
25+	20,45	20,84

Dipandang dari umur perkawinan pertama perempuan, persentase penduduk perempuan yang kawin di bawah umur 19 tahun pada tahun 2012 adalah 22,05 persen dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 27,16 persen. Sementara itu, pada kelompok 19-24 tahun, persentase penduduk

Gambar 1.5
Persentase Wanita 10 Tahun ke
Atas yang Pernah Kawin
Menurut Umur Perkawinan
Pertama Tahun 2012-2013 (%)



perempuan yang pernah kawin sebesar 52,00 persen pada tahun 2013 jauh menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 57,50 persen. Sedangkan perempuan yang pernah kawin dengan usia perkawinan pertama dalam usia 25 tahun ke atas pada tahun 2013 mencapai 20,84 persen. Dengan keadaan ini, diharapkan penduduk perempuan yang mempunyai status kawin dapat menjadi ibu yang berkualitas sehingga mampu melahirkan anak yang berkualitas pula sehingga sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan khususnya Kabupaten Sumba Barat menjadi semakin berkualitas.

Tabel 1.7 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Sedang Tidaknya Menggunakan/Memakai Alat/Cara KB Tahun 2012-2013

Sedang Menggunakan Alat KB?	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Ya	26,41	42,88
Tidak	73,59	57,12

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2013, terdapat sebanyak 42,88 persen penduduk perempuan usia 15-49 tahun dengan status kawin yang sedang memakai/menggunakan alat/cara KB. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 26,41 persen. Sedangkan penduduk perempuan usia 15-49 tahun dengan status yang sama tapi tidak memakai/menggunakan alat KB sebanyak 57,12 persen pada tahun 2013.

Tabel 1.8 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai Tahun 2012-2013

Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai	2012	2013
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	18,49	20,21
MOP/Vasektomi	8,39	2,85
AKDR/IUD	5,26	2,74
Suntikan	33,30	31,68
Susuk KB	26,22	32,83
Pil KB	8,33	7,48
Kondom	0,00	0,00
Intravag	0,00	0,54
Alat/Cara Tradisional	0,00	1,68

Pada tahun 2013 sebanyak 56,14 persen dari penduduk perempuan Sumba Barat berada pada usia produktif. Sedangkan yang memiliki status kawin dan sedang memakai/menggunakan alat KB, sebagian besarnya memakai/menggunakan susuk KB sebesar 32,83 persen. Dan diurutkan berikutnya adalah dengan menggunakan suntikan sebagai alat/cara KB dengan persentase sebesar 31,68 persen. Sedangkan MOW berada di urutan ketiga dengan persentase pemakai/pengguna sebesar 20,21 persen. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengatur kelahiran diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi ibu dan anak-anak yang dilahirkannya, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.

2. Kesehatan & Gizi

Kesehatan dan Gizi

Pembangunan kesehatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional/regional, karena masalah kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang biasa dipakai untuk melihat derajat kesehatan adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain derajat kesehatan, aspek penting lain dari kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain dapat diukur dari beberapa indikator seperti angka kesakitan dan status gizi. Beberapa indikator pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti cakupan imunisasi, penolong persalinan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan derajat dan status kesehatan masyarakat.

Status Kesehatan

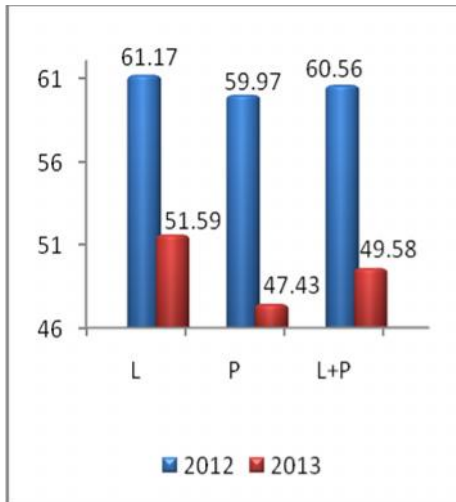
Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, oleh karena, misalnya, pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan salah satunya indikator angka kesakitan.

Tabel 2.1 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2013

Angka Kesakitan*)	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	61,17	51,59
Perempuan	59,97	47,43
L + P	60,56	49,58

*) *Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan yang lalu*

Gambar 2.1
Angka Kesakitan
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2012-2013



Pada tahun 2012 penduduk yang mempunyai keluhan kesakitan mencapai 60,56 persen. Pada tahun 2013 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 49,58 persen, atau kurang dari setengah penduduk Sumba Barat pernah mengalami gangguan kesehatan yang berakibat terganggunya pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat dikategorikan cukup baik. Status kesehatan penduduk laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, meskipun tampak bahwa proporsi penduduk laki-laki yang mengalami gangguan kesehatan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Status Gizi Balita

Peningkatan kualitas fisik sumber daya manusia akan lebih berhasil jika dilakukan sejak dini, yang dalam hal ini pemantauan status gizi balita berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas fisik penduduk Sumba Barat. Salah satu faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu). ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi karena selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan terhadap beberapa penyakit. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa umumnya anak usia 2-4 tahun di Sumba Barat mendapatkan ASI selama 12-17 bulan, yang idealnya selama 24 bulan. Untuk kelompok 18-23 bulan pada tahun 2013 sebanyak 21,37 persen, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,63 persen. Sedangkan Anak Usia 2-4 Tahun yang diberikan selama 24 bulan ke atas persentasenya mencapai 21,60 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.2 Persentase Anak Usia 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui Tahun 2012-2013

Lamanya Disusui (Bulan)	2012	2013
(1)	(2)	(3)
0-5	1,02	1,15
6-11	9,54	10,69
12-17	51,99	45,18
18-23	12,63	21,37
24+	24,82	21,60

Dilihat dari status gizi balita, perkembangannya selama periode 2012-2013 dapat dilihat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Pada Tabel 2.3 memperlihatkan status gizi balita di Sumba Barat dengan status gizi balita yang baik, kurang dan buruk.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat selama periode tahun 2013, masih cukup banyak ditemukan balita dengan status gizi buruk sebanyak 193 balita. Jumlah ini telah mengalami peningkatan dari tahun 2012 dimana terdapat 110 balita berstatus gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 2.3 Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012-2013

Status Gizi	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Baik	9.048	6.978
Kurang	1.519	883
Buruk	110	193

Sumber : Dinkes Kab. Sumba Barat

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Data pada Tabel 2.4 menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Sumba Barat pada periode tahun 2012-2013. Indikator ketersediaan berbagai sarana kesehatan tersebut mencakup jumlah Dokter, jumlah Puskesmas, jumlah Rumah Sakit, kapasitas tempat tidur serta jumlah hari perawatan di rumah sakit. Pada tahun 2013 terdapat 35 dokter di Kabupaten Sumba Barat dengan perbandingan dokter dan total penduduk yang dilayani mencapai 1 : 3.365 jiwa. Sedangkan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan yang terdapat di setiap kecamatan pada tahun 2013 berjumlah 27 Puskesmas (termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling). Pada Tahun 2013 perbandingan/rasio Dokter per Puskesmas adalah 1,30.

Tabel 2.4 Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2012-2013

Tenaga/Sarana Kesehatan	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Jumlah Dokter	33	35
Perbandingan Dokter dan Penduduk Sumba Barat	1 : 3.534	1 : 3.365
Jumlah Puskesmas *)	27	27
Jumlah Dokter per Puskesmas	1,22	1,30
Jumlah Rumah Sakit	2	2
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	223	221
Jumlah Hari Perawatan di Rumah Sakit	58.798	58.798

*)Termasuk Puskesmas Pembantu dan Keliling

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat harus datang ke rumah sakit. Pada tahun 2013 terdapat 2 rumah sakit di Kabupaten Sumba Barat. Kedua Rumah Sakit tersebut memiliki kapasitas 221 tempat tidur. Kondisi kapasitas tempat tidur ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari hari perawatan di rumah sakit maka dapat diketahui selama tahun 2013 seluruh pasien yang menjalani rawat inap di 2 rumah sakit tersebut menjalani 58.798 hari perawatan.

Bagian penting dalam upaya mengurangi insiden kematian bayi dan kematian maternal (ibu) adalah penyediaan pelayanan persalinan oleh tenaga medis. Program Bidan di Desa (BDD) merupakan upaya terobosan untuk maksud tersebut. Sampai dengan tahun 2013 jumlah bidan yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat berjumlah 52 bidan. Jumlah ini masih sangat kurang mengingat jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2013 telah mencapai 74 desa/kelurahan.

Tabel 2.5 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2012-2013

Penolong Kelahiran Pertama	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Tenaga Medis	68,40	66,87
Dokter	12,12	11,55
Bidan	55,86	54,44
Tenaga Medis Lain	0,42	0,88
Bukan Tenaga Medis	31,60	33,13
Dukun	30,31	31,50
Famili	1,29	0,84
Lainnya	0,00	0,79

Berkaitan dengan persalinan, diupayakan terus menerus agar penolong persalinan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 66,87 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 68,40 persen. Jika dilihat lebih rinci, maka penolong persalinan oleh tenaga medis mayoritas dilakukan oleh bidan yaitu sebesar 54,44 persen. Sedangkan penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter yaitu sebesar 11,55 persen.

Sedangkan penolong persalinan yang dilakukan bukan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2013 mencapai 33,13 persen dimana sebesar 31,50 persen persalinan ditolong oleh dukun serta sisanya ditolong oleh famili dan lainnya. Cukup tingginya persalinan yang dilakukan oleh bukan tenaga medis perlu menjadi perhatian pemerintah supaya angka kematian bayi dan ibu bisa ditekan.

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2013, fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan penduduk untuk keperluan berobat jalan berturut-turut adalah puskesmas (69,53 persen), praktik dokter (13,13 persen), rumah sakit (7,44 persen), dan praktik petugas kesehatan (6,81 persen).

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Tahun 2012-2013

Tempat/Cara Berobat	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	10,16	7,44
Praktik Dokter	15,81	13,13
Puskesmas	63,24	69,53
Praktik Petugas Kesehatan	7,87	6,81
Dukun/Tabib/Sinshe/Tradisional/Batra	0,68	1,68
Lainnya	2,23	1,41

3. Pendidikan

3. Pendidikan

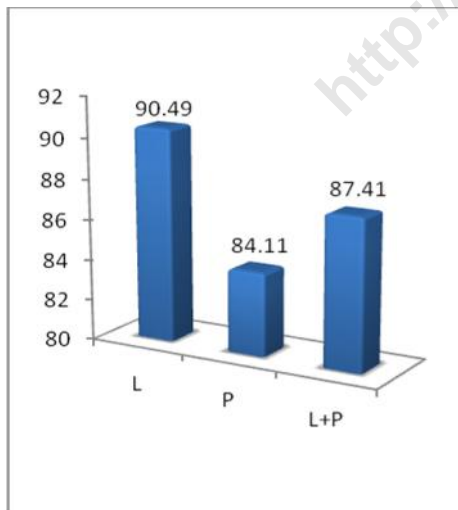
Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Pelaksanaan program wajib belajar 6 tahun telah meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pada saat sekarang, jangkauan wajib belajar semakin diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun. Dengan program ini diharapkan hampir semua penduduk yang berusia 7-15 tahun mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Tingkat Pendidikan

Pada tingkat makro, tingkat pendidikan yang sangat mendasar dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk dewasa (umur 10 tahun ke atas). Pada tahun 2012 angka melek huruf penduduk Sumba Barat telah mencapai 83,27 persen, dan meningkat menjadi 87,41 persen pada tahun 2013. Tabel 3.1 menyajikan angka melek huruf menurut jenis kelamin. Angka melek huruf tahun 2013 menunjukkan bahwa laki-laki memiliki persentase yang lebih besar daripada perempuan.

Gambar 3.1
Persentase Angka Melek Huruf
Tahun 2013



Tabel 3.1 Persentase Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2013

Dapat Baca Tulis	2012			2013		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Huruf Latin	81,42	80,57	81,01	86,32	79,06	82,82
Huruf Arab	0,00	0,00	0,00	1,67	2,46	2,05
Huruf Lainnya	2,31	2,20	2,26	2,50	2,59	2,54

Selain angka melek huruf, tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah (tahun). Secara umum indikator ini menunjukkan sampai dimanakah jenjang pendidikan masyarakat di suatu wilayah.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas penduduk karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, peningkatan pendidikan penduduk terus menerus terjadi, yaitu dengan semakin banyaknya penduduk yang berpendidikan lebih tinggi.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2012-2013

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	2012			2013		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Punya Ijazah	49,83	47,10	48,54	49,84	45,80	47,89
SD/MI/Sederajat	19,39	23,18	21,19	23,46	25,65	24,51
SLTP/MTs	11,49	11,85	11,66	12,91	12,94	12,92
SLTA/Sederajat	13,59	12,85	13,24	11,61	12,55	12,06
D I/DII	0,25	0,65	0,44	0,11	0,25	0,18
D III/sar Mud	1,35	0,94	1,15	0,10	0,38	0,23
D IV/S1/S2/S3	4,10	3,43	3,79	1,98	2,43	2,19

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berpendidikan SLTP/MTs pada tahun 2012 mencapai 11,66 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 12,92 persen. Jumlah tamatan SD/MI sebesar 21,19 persen pada tahun 2012, dan mengalami peningkatan menjadi 24,51 persen pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun yang sama jumlah penduduk yang tidak mempunyai ijazah SD sebesar 47,89 persen yang sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2012 yang persentasenya mencapai 48,54 persen. Lebih banyaknya proporsi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah harus

mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah karena diketahui juga bahwa untuk pembangunan yang berkelanjutan, kebutuhan akan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dirasakan sangat mendesak.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan meningkatkan pemerataan pada pemanfaatan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pada tahun 2013, sekitar 145 persen penduduk usia 7-12 tahun telah bersekolah pada sekolah dasar. Angka ini memang agak sulit dipahami, namun data lapangan menunjukkan bahwa masih ada murid sekolah dasar dengan usia di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah Tahun 2012-2013

Kelompok Umur	2012	2013
(1)	(2)	(3)
7-12	115	145
13-15	85	99
16-18	87	73

Partisipasi sekolah menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 3.3. Pada tahun 2012 jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada tingkat SD sebanyak 115 persen dan mengalami peningkatan menjadi 145 persen pada tahun 2013. Sedangkan penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah pada tingkat SLTP sebanyak 85 persen pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan menjadi 99 persen pada tahun 2013. Sedangkan pada penduduk usia 16-18 tahun, jenjang pendidikan SLTA/SMK, partisipasi sekolah

kelompok ini pada tahun 2012 adalah sebesar 87 persen dan mengalami penurunan menjadi 73 persen pada tahun 2013.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2013

Jenjang Pendidikan	2012	2013
(1)	(2)	(3)
SD	95,36	94,36
SLTP	39,26	59,86
SLTA	43,25	46,30

Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. Tabel 3.4 menunjukkan penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SD yaitu 94,36 persen pada tahun 2013. Untuk jenjang lanjutan tingkat pertama sebesar 59,86 persen. Sementara pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 46,30 persen.

Fasilitas Pendidikan

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seharusnya sejalan dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Tabel 3.5 menunjukkan perkembangan fasilitas pendidikan pada tahun 2012-2013. Pada tahun 2013 ini Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah sedikit mengalami perubahan, jenjang SD Rasio Murid-Guru sebesar 60, yang artinya ada sebanyak 60 murid yang diawasi oleh setiap guru. Pada jenjang SLTP Rasio Murid-Guru sebesar 24, artinya setiap guru mengawasi 24 murid. Dan untuk tingkat SLTA Rasio Murid-Guru adalah 24 yang berarti setiap guru mengawasi 24 murid. Keadaan ini memberikan gambaran jumlah guru di Sumba Barat masih belum

proporsional dengan banyaknya murid sehingga murid kurang mendapat pengawasan oleh guru. Rasio Guru-Sekolah pada tahun 2012 dan 2013 juga mengalami sedikit perubahan, yaitu untuk jenjang SD 5 banding 1, sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP sebanyak 9 banding 1, dan untuk jenjang SLTA sebanyak 16 banding 1.

Tabel 3.5 Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2012-2013

Jenjang Pendidikan	2012		2013	
	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	21	12	60	5
SLTP	10	19	24	9
SLTA	14	28	24	16

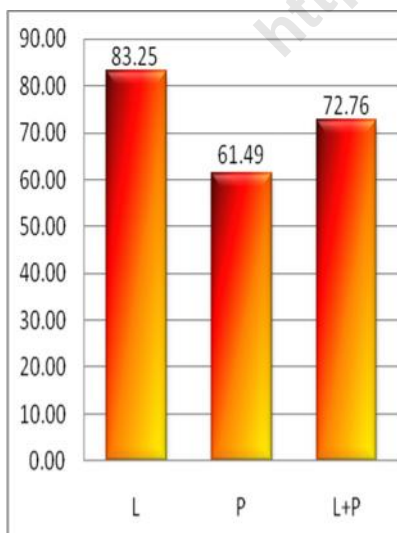
4. Ketenagakerjaan

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan (kategori angkatan kerja) pada tahun 2013 tercatat sebesar 72,76 persen, terdiri dari 70,49 persen penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dan 2,27 persen penduduk 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan.

Gambar 4.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan), disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja pada tahun 2013 menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan perempuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri di Sumba Barat perempuan dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan jumlahnya juga cukup banyak. Hal ini disebabkan semakin membaiknya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki dan semakin besarnya keinginan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan di luar rumah.

**Tabel 4.1 TPAK Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2012 - 2013**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	84,14	57,19	71,19
2013	83,25	61,49	72,76

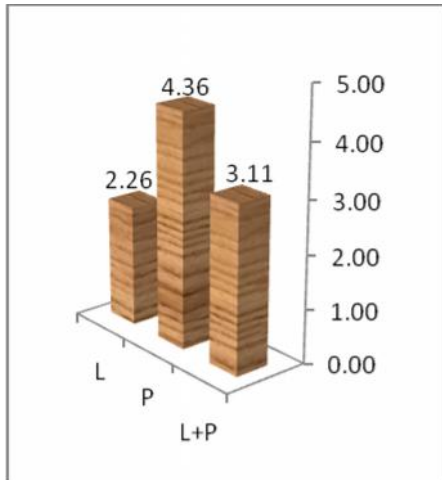
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih tinggi partisipasinya dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

**Tabel 4.2 Kesempatan Kerja Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	98,81	97,06	98,14
2013	97,74	95,64	96,89

Banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah karena mereka terpaksa menganggur. Pada tahun 2013 tingkat kesempatan kerja sebesar 96,89 persen.

Gambar 4.2
Tingkat Pengangguran
Terbuka Tahun 2013



Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2012 - 2013

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	1,19	2,94	1,86
2013	2,26	4,36	3,11

Tabel 4.3 menunjukkan angka pengangguran terbuka tahun 2012-2013. Angka-angka yang tertera pada tabel 4.3 ternyata masih relatif rendah bahkan untuk ukuran internasional. Hal ini terjadi karena di Sumba Barat dan Indonesia pada umumnya, menganggur merupakan keadaan yang tidak mungkin dilakukan oleh penduduk, sehingga kesempatan kerja yang tersedia langsung diterima sebagai pekerjaan padahal kesempatan kerja yang ada tersebut umumnya adalah sektor informal. Secara definisi mereka dianggap bekerja tapi pendapatan yang diperoleh sangat tidak mencukupi.

Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) tetap merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2013 sebanyak 67,42 persen pekerja diserap sektor primer dimana tenaga yang terserap di sektor pertanian sebesar 64,47 persen sedangkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,95 persen. Tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya perkembangan pada sektor yang lebih

modern, yaitu sektor sekunder/industri dan sektor jasa-jasa/tersier. Seperti yang terlihat pada tabel 4.4, persentase penduduk yang bekerja di sektor sekunder (industri; listrik, gas, dan air; dan konstruksi) dan tersier (perdagangan; transportasi dan komunikasi; keuangan; dan jasa) pada tahun 2013 berturut-turut hanya sebesar 9,85 persen dan 22,73 persen.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2013

Lapangan Usaha Utama	2013
(1)	(2)
Pertanian	64,47
Pertambangan dan Penggalian	2,95
Industri	7,97
Listrik, Gas dan Air	-
Konstruksi	1,88
Perdagangan	6,01
Transportasi dan Komunikasi	3,30
Keuangan	0,82
Jasa	12,60

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Terdapat 7 Status Pekerjaan Utama yaitu: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian serta pekerja tidak dibayar. Gambaran mengenai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama pada tahun 2013 di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2013

Status Pekerjaan Utama	2013
(1)	(2)
Berusaha Sendiri	16,55
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh tidak dibayar	29,95
Berusaha dibantu Buruh Tetap/ Buruh dibayar	1,54
Buruh/Karyawan/Pegawai	14,60
Pekerja Bebas di Pertanian	0,00
Pekerja Bebas di Non Pertanian	1,35
Pekerja Tidak Dibayar	36,00

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 16,55 persen sedangkan berusaha dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap mencapai 29,95 persen.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa jumlah pekerja berstatus buruh/karyawan tahun 2013 yaitu sebanyak 14,60 persen sedangkan pekerja yang berusaha dengan dibantu buruh tetap yaitu 1,54 persen. Kedua kategori ini, buruh/karyawan dan berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap, termasuk dalam kategori pekerja di sektor formal yang jumlahnya hanya mencapai 16,14 persen pada tahun 2013. Dengan demikian pada tahun 2013, jumlah pekerja di sektor informal sudah mencapai 83,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Sumba Barat bekerja di sektor informal, dimana pekerja tersebut adalah pekerja yang berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap tanpa harus menerima upah yang tetap atau bahkan anggota rumahtangga yang tidak menerima upah sepeser pun.

Jam Kerja

Jumlah jam kerja selama seminggu dapat memberikan gambaran tingkat produktivitas. Pada tahun 2013 masih cukup banyak ditemui penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu). Penduduk perempuan pada umumnya lebih banyak yang kurang produktif, yang mana sebanyak 60,18 persen pekerja perempuan bekerja kurang dari 35 jam seminggu, sedangkan laki-laki jumlah pekerja yang bekerja dengan jumlah jam yang sama, yakni kurang dari 35 jam per minggu berjumlah 43,77 persen.

Tabel 4.6 Persentase Penduduk yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2013

Uraian		2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	< 35	35,96	43,77
	≥ 35	64,04	56,23
Perempuan	< 35	66,53	60,18
	≥ 35	33,47	39,82
L + P	< 35	47,63	50,37
	≥ 35	52,37	49,63

Dari tabel diatas terlihat bahwa masih banyak penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal, yaitu sebanyak 50,37 persen pada tahun 2013. Hal ini menandakan masih rendahnya produktivitas kerja masyarakat Kabupaten Sumba Barat karena sebagian besar pekerja berkerja di sektor informal yang tidak memiliki rutinitas jam kerja yang tetap dan pasti.

5. Pola Konsumsi

5. Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Makin besar pendapatan atau penghasilan suatu rumah tangga, berarti makin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya makin kecil pendapatan suatu rumah tangga berarti makin rendah tingkat kesejahteraannya. Penghitungan pendapatan masyarakat secara langsung melalui survei seringkali sulit dilakukan, sehingga untuk mengatasi kesulitan itu, maka penghitungannya dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan.

Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dibedakan menurut jenisnya, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran ini selain dapat diketahui jumlah pendapatan, juga dapat dilihat pola konsumsi masyarakat, yang mana semakin rendah persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya akan semakin baik, sebaliknya makin tinggi persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya makin buruk. Atau dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan.

Perubahan Tingkat Kesejahteraan

Faktor utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah daya beli, sehingga apabila daya beli menurun, maka berdampak pada menurunnya kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun. Tabel 5.1 menyajikan perkembangan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk di Kabupaten Sumba Barat pada periode tahun 2012-2013 yang belum memperlihatkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat jika dikaitkan dengan tingkat inflasi yang terjadi.

Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan riil dari pengeluaran per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2012 adalah Rp. 453.678. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan pengeluaran per kapita menjadi Rp. 370.853 atau terjadi penurunan nominal setahun sebesar 18,26 persen.

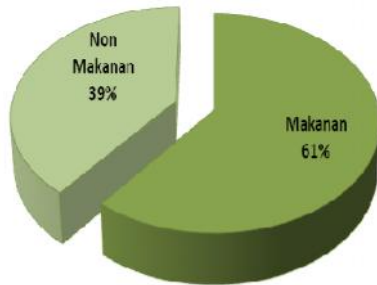
Tabel 5.1 Pengeluaran rata-rata per Kapita Sebulan Tahun 2012-2013

Tahun	Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Penurunan Nominal Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2012	453.678	
2013	370.853	18,26

Pola Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan. Keadaan ekonomi Indonesia yang bergejolak hingga saat ini masih diyakini berdampak pula pada pola pengeluaran rumah tangga khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Pola konsumsi yang terjadi pada masyarakat cenderung lebih kepada konsumsi makanan. Penurunan standar hidup secara drastis akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga memaksa masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah untuk melakukan tindakan dengan pola konsumsi yang lebih memberikan prioritas pada pengeluaran untuk makanan.

Gambar 5.1
Pengeluaran per Kapita
Sebulan menurut Jenis
Pengeluaran Tahun 2013



Tabel 5.2 Pengeluaran per Kapita Sebulan
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013
(Rupiah)

Tahun	Makanan	Non Makanan	Total Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	224.877 (60,64)	145.976 (39,36)	370.853

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase pengeluaran

Tabel 5.2 menyajikan pola konsumsi rumah tangga selama periode 2013. Pada periode ini, porsi pengeluaran untuk makanan adalah sebesar 60,64 persen. Sedangkan porsi pengeluaran untuk non makanan sebesar 39,36 persen. Pola konsumsi dimana porsi pengeluaran untuk makanan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran non makanan memberikan petunjuk bahwa kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya tercapai selama periode tersebut.

6. Perumahan & Lingkungan

Perumahan dan Lingkungan

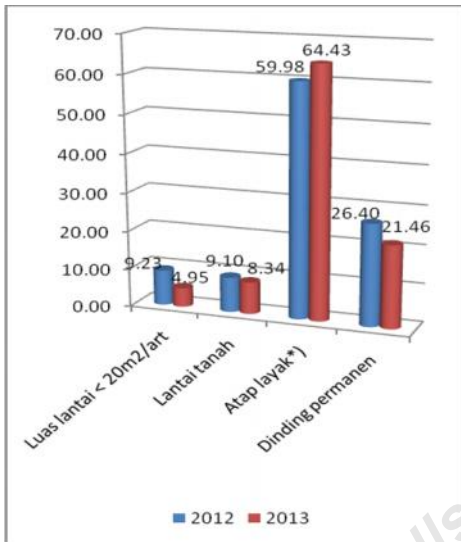
Manusia dan alam lingkungannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan ini berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Sebagai makhluk sosial manusia selalu ingin bersama orang lain, maka muncul kelompok rumah-rumah yang disebut pemukiman.

Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan pangan. Pada saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu merupakan hal penting yang menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan yang secara nyata dapat digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga menentukan tingkat kesejahteraan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya tidak berdesakan. Pada tahun 2013 tercatat sekitar 4,95 persen rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat yang tinggal dalam rumah dengan ruang yang tersedia untuk setiap anggota rumah tangganya kurang dari 20 m². Hal ini berarti sebagian besar rumah tangga (95,05 persen) tinggal dalam rumah dengan luas yang memadai.

Gambar 6.1
Persentase Rumah Tinggal
Menurut Beberapa Indikator
Kualitas Perumahan
Tahun 2012-2013



Tabel 6.1 Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2012-2013

Indikator Kualitas Perumahan	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Luas lantai < 20 m ² /art	9,23	4,95
Lantai tanah	9,10	8,34
Atap layak *)	59,98	64,43
Dinding Permanen	26,40	21,46

*) Tidak terbuat dari dedaunan

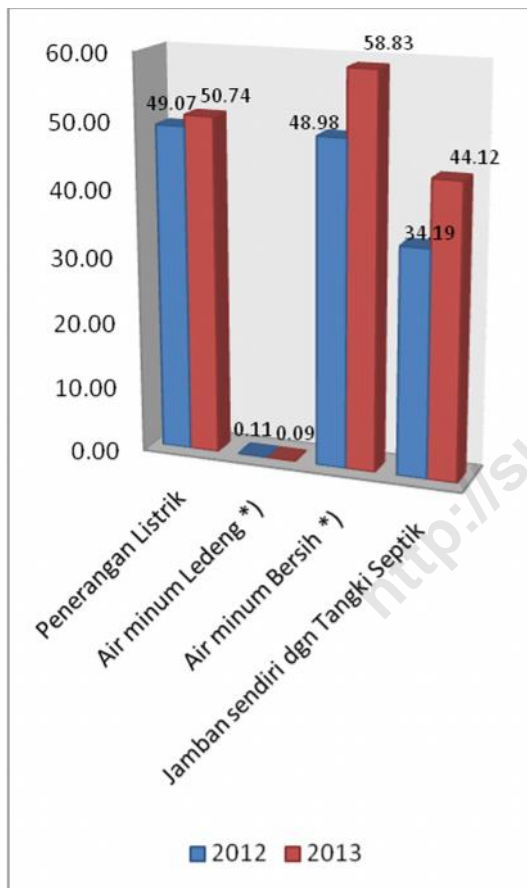
Tidak jauh berbeda dengan indikator lantai tanah, indikator dinding tembok permanen menunjukkan angka yang bisa dikatakan masih cukup kecil yaitu 26,40 persen pada tahun 2012 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013 menjadi sekitar 21,46 persen. Sebagaimana pada indikator lantai tanah, hal ini dikarenakan masih banyak rumah adat di Sumba Barat masih menggunakan dinding bambu atau kayu.

Kondisi yang baik ditunjukkan oleh indikator atap layak, dimana pada tahun 2013 persentasenya menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat (64,43 persen) sudah menggunakan atap layak (untuk Sumba Barat banyak masyarakat yang rumahnya telah menggunakan atap seng). Dengan kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, jika dilihat dari kualitas bahan bangunan yang dipakai, kondisi perumahan di Sumba Barat belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal.

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Gambar 6.2
Persentase Rumah Tinggal
Menurut Beberapa Fasilitas
Perumahan Tahun 2012-2013



Tabel 6.2 **Persentase Rumah Tinggal Menurut**
Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun
2012-2013

Indikator Fasilitas Perumahan	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Penerangan Listrik	49,07	50,74
Air Minum Ledeng*)	0,11	0,09
Air Minum Bersih **)	48,98	58,83
Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	34,19	44,12

*) *Leding meteran dan Leding Eceran*

**) *Bersumber dari sumur/mata air yang jaraknya ke tempat pembuangan limbah > 10 m*

Seperti yang terlihat pada Tabel 6.2 pada tahun 2013 sudah sekitar 50,74 persen rumah tangga di Sumba Barat menggunakan listrik sebagai alat penerangan, dimana 36,11 persen menggunakan listrik PLN sedangkan 14,63 persen menggunakan listrik Non-PLN. Masih banyak desa-desa di Kabupaten Sumba Barat yang belum dapat dijangkau oleh PLN, sehingga masih menggunakan penerangan pelita/obor. Masih terbatasnya pasokan listrik di Sumba Barat, menyebabkan biaya pemasangan listrik PLN masih cukup mahal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membelinya.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Program penyediaan air bersih tersebut ternyata belum dapat meningkatkan jumlah rumah tangga yang mempunyai akses pada air ledeng. Persentase rumahtangga yang menggunakan air ledeng pada tahun 2012 sebesar 0,11 persen dan mengalami

penurunan menjadi 0,09 persen pada 2013. Rumah tangga yang tidak mempunyai akses pada air ledeng, sumber air minumannya diperoleh dari air kemasan maupun air isi ulang, sumur, dan mata air. Sumur atau mata air dikatakan sebagai sumber air bersih jika jarak ke tempat pembuangan limbah > 10 meter. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih (jarak ke tempat pembuangan limbah > 10 meter) pada tahun 2013 tercatat sebesar 58,83 persen (dengan catatan 32,10 persen tidak mengetahui jaraknya) yang berarti mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2012 yang mencapai 48,98 persen.

Fasilitas rumah tinggal yang lain yang berkaitan dengan kesehatan adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2012 tercatat sekitar 34,19 persen rumah tangga di Sumba Barat yang mempunyai jamban sendiri dengan tangki septik. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2013 jumlah tersebut meningkat menjadi 44,12 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- 2013, **Sumba Barat Dalam Angka 2013**,
Waikabubak: Badan Pusat Statistik
- 2013, **Statistik Sosial dan Kependudukan Nusa Tenggara Timur**,
Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2013, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat**,
Waikabubak: Badan Pusat Statistik

<http://sumbabaratkab.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio Anak Wanita

Rata-rata banyaknya anak di bawah usia lima tahun per 1.000 wanita usia subur (15-44 th).

Rasio Jenis Kelamin

Banyaknya laki-laki dari setiap 100 wanita.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekan salah satu metode kontrasepsi.

Klinik Keluarga Berencana

Tempat dimana pelayanan keluarga berencana dapat diperoleh. Tempat ini dapat berupa rumah sakit, puskesmas, balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA), Team Medis Keliling (TMK) atau tempat bebas lainnya yang ditentukan.

Status Gizi

Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategorisasi status gizi ini dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

ISTILAH TEKNIS

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai pekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Partisipasi Kasar

Rasio anak yang sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sumbar.bps.go.id>



BPS KABUPATEN SUMBA BARAT

Jl. Wee Karou, Waikabubak 87224

Telp. (0387) 21256 Fax. (0387) 21256

Email: bps5301@bps.go.id